

# DETERMINAN AKSESIBILITAS *INTERNET FINANCIAL REPORTING* MELALUI *E-GOVERNMENT* PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Verawaty  
Universitas Bina Darma

## **Abstract:**

*The financial information through internet is called IFR (Internet Financial Reporting) which is a combination between the internet multimedia capability and capacity to communicate the financial information interactively. Its accessibility concerns with the ease with which users can locate and view financial reporting data provided at the website. Referring to the literatures on disclosure and accountability in the public sector, this research is aimed to examine the association between the accessibility of IFR in e-government by using Accessibility Index Value and the determinant variables named as size, income per capita, and debt level, which are assumed to have the positive associations. The study looks at Indonesia local government's use of the internet and whether local government is likely to be more accountable as a result of the 66 local governments. The associations between the accessibility index value and the determinant variables indicate no significance in the statistical test. There are no statutory requirements concerning the use of the internet in the communication of performance results and consequently, the choice of the type of information and documents to be inserted in the websites is voluntary. According to the interviews with local government practitioners, the arguments are the characteristics of the population, documenting culture, and political pressures into the consideration to improve the accessibility of financial statements in the e-government. Besides, the juridical aspect, especially Act No.14/2008 on The Disclosure of Public Information has not set on the ways or procedures to disseminate public information. Thus dissemination of financial statements on Internet Financial Reporting in e-government is still not fully utilized.*

**Keywords:** *internet financial reporting, accessibility index value, income per capita, debt level*

## **Abstrak:**

Kewajiban diseminasi informasi publik dapat disampaikan melalui IFR pada *e-government* yang terlebih hampir semua pemerintah daerah di Indonesia telah memilikinya. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, hal tersebut dikaitkan dengan beberapa variabel antara lain nilai, *size*, *income percapita*, dan *debt level* pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat hubungan positif antara *size*, *income per capita*, dan *debt level* pemerintah daerah dengan aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government* serta mengkaitkannya dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 66 pemerintah daerah di Indonesia. Sampel ditentukan berdasarkan *purposive sampling method*, yaitu memiliki *e-government* sampai dengan November 2014 dan *e-government* tersebut tidak dalam perbaikan (*maintenance*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *size*, *income per capita*, dan *debt level* dengan aksesibilitas laporan keuangan. Melalui metoda wawancara diperoleh ditambahkan argumen bahwa karakteristik penduduk, kultur mendokumentasi, dan tekanan politis menjadi pertimbangan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap laporan keuangan dalam *e-government*. Selain itu aspek yuridis, terutama Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ternyata belum mengatur tentang cara atau prosedur menyebarluaskan informasi publik. Jadi diseminasi laporan keuangan melalui *Internet Financial Reporting* melalui *e-government* masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

**Kata Kunci:** *internet financial reporting, accessibility index value, income per capita, debt level*

---

\* Author can be contacted at: verawaty\_mahyudin@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN

Pengungkapan atau pelaporan akuntansi sektor publik dengan menggunakan media *website* pemerintah (*e-government*) merupakan konten yang biasa disebut IFR (*Internet Financial Reporting*). Menurut Oyelere et al (2003), IFR merupakan kombinasi kapasitas dan kapabilitas multimedia internet untuk mengkomunikasikan secara interaktif tentang informasi keuangan. Laporan keuangan yang biasanya dicetak, melalui internet pengguna laporan keuangan dapat didistribusikan lebih cepat (aspek *timeliness*) dan mampu mengeksplorasi kegunaan teknologi ini untuk lebih membuka diri dengan menginformasikan laporan keuangannya (aspek *disclosure*).

IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government* merupakan media yang paling memenuhi aspek 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) untuk menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai laporan keuangan kepada semua *stakeholder* publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, DPRD, BPK, analis ekonomi, investor, kreditur, donatur, dan rakyat. Berdasarkan penelitian Verawaty (2012), 87,9% pemerintah daerah tingkat provinsi memiliki *e-government* dalam status online/aktif. Namun hanya 37,93 % yang melakukan IFR (*Internet Financial Reporting*). Hal ini berarti diseminasi informasi ini erat kaitannya dengan kesiapan badan publik untuk menyediakannya agar mudah diakses oleh publik. Walaupun secara finansial serta didukung SDM yang handal, ternyata tidak semua pemerintah daerah melakukannya. Padahal menurut UU KIP Pasal 9 (4), kewajiban diseminasi informasi publik tersebut dapat disampaikan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat, salah satunya melalui *e-government* yang terlebih hampir semua pemerintah daerah di Indonesia telah memilikinya. Jadi IFR dengan mudah bisa diterapkan sebagai salah satu konten didalamnya. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, hal tersebut dikaitkan dengan beberapa variabel determinan (faktor penentu) antara lain nilai, *size*, *income percapita*, dan *debt level* pemerintah daerah.

Anggaran teknologi informasi yang lebih besar akan lebih membiayai daerah dengan suatu fungsi teknologi informasi yang mampu mendesain dan mempertahankan *website* yang lebih canggih dengan aksesibilitas yang paling mudah. Hal ini jelas berhubungan dengan *size* dengan proksi populasi penduduk, semakin besar kota, semakin besar jumlah penduduk dan semakin besar pula anggaran yang dapat terkumpul dan tentunya semakin tinggi pula tuntutan akan fungsi akuntansi serta aksesibilitas terhadap informasi laporan keuangannya.

Adapun permintaan yang meningkat untuk laporan keuangan akan memerlukan efisiensi biaya untuk penyediaan data laporan keuangan di *website* pemerintah tersebut.

Efisiensi biaya ini akan lebih besar untuk daerah-daerah dengan *income percapita* yang lebih tinggi yang secara umum memiliki proporsi yang lebih tinggi atas penduduk yang berhubungan dengan internet. Daerah-daerah dengan *income percapita* yang tinggi kemungkinan akan menyediakan aksesibilitas paling mudah untuk data laporan keuangannya.

Jika dikaitkan dengan *debt level*, dorongan yang diberikan oleh pemilik hutang (pemerintah daerah) untuk mempublikasikan laporan keuangan lebih dominan daripada biaya-biaya atau tekanan-tekanan regulasi dan politis. Hal ini disebabkan oleh pemberi hutang (debitur) akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dengan cara yang paling aplikatif termasuk aksesibilitasnya.

Penelitian mengenai aksesibilitas terhadap informasi laporan keuangan belum pernah diangkat di Indonesia. Dengan regulasi UU KIP yang mewajibkan penyediaan informasi tersebut sebagai salah satu informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan fasilitas *e-government* yang kontennya bisa diaplikasikan sebagai media publikasi laporan keuangan, penulis ingin mengangkat fenomena penelitian ini dengan mengkaitkan dengan variabel-variabel di atas yang secara empiris belum memiliki kesimpulan yang sama di beberapa negara.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Keagenan dan *Signalling* dalam Pemerintahan**

Menurut Zimmerman (1977), *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai prinsipal memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut prinsipal karena menggantikan peran rakyat. Namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, prinsipal, yaitu rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen, baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai prinsipal juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

Hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi (Moe, 1984). Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan.

Fadzil dan Nyoto (2011) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan prinsipal-agen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.

Dalam konteks teori *signalling*, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Evans dan Patton, 1987). Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.

APBD menurut UU Keuangan Negara ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim dan Abdullah, 2006). Menurut Fadzil dan Nyoto (2011), hubungan keagenan menimbulkan asimetri informasi yang menimbulkan beberapa perilaku seperti oportunistik, *moral hazard*, dan *adverse selection*. Perilaku oportunistik dalam proses penganggaran contohnya, (1) anggaran memasukkan program yang berorientasi publik tetapi sebenarnya mengandung kepentingan pemerintah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek mereka dan (2) alokasi program ke dalam anggaran yang membuat pemerintah lebih kuat dalam posisi politik terutama menjelang proses pemilihan, yaitu program yang menarik bagi pemilih dan publik dapat berpartisipasi di dalamnya.

Kedua teori ini menjadi dasar bahwa untuk meminimalkan asimetri informasi, pengungkapan akuntansi sektor publik diperlukan. Tentu dengan diseminasi melalui keunggulan internet dengan fasilitas *e-government*, pengungkapan IFR (*Internet Financial Reporting*) akan lebih memadai dengan keunggulan utama, yaitu dapat didistribusikan lebih cepat (aspek *timeliness*) dan dapat dieksploitasi untuk lebih membuka diri dengan menginformasikan laporan keuangannya (aspek *disclosure*).

## **2.2 Penelitian-Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis Penelitian**

Berikut variabel-variabel penelitian sebagai determinan (faktor penentu) yang diasumsikan mempunyai hubungan positif sehingga dapat menjelaskan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*:

### a. Variabel *Size*

Dalam era pertumbuhan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah menghadapi kenaikan permintaan atau tuntutan terhadap pengawasan informasi dan dorongan yang lebih besar terhadap kinerja. Secara umum, kota-kota besar (dalam hal ini provinsi) akan menyediakan program dan pelayanan untuk penduduk dalam jumlah besar dan mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya berdasarkan penelitian Giroux dan McLelland, 2003 dan penelitian Giroux dan Shield, 1993.

Temuan dalam literatur pengungkapan akuntansi sektor publik menemukan bahwa aktivitas yang lebih besar tersebut mengakibatkan permintaan informasi dalam jumlah yang besar atas informasi kinerja pemerintah, termasuk juga pemerintah daerah. Permintaan tersebut dapat diakomodir melalui aksesibilitas IFR yang merupakan metode pengungkapan alternatif yang lebih efektif dibandingkan dengan metode tradisional melalui pendistribusian dokumen cetakan laporan keuangan kepada *stakeholder* tertentu.

Penelitian-penelitian yang menguji IFR pada pemerintah daerah menyatakan bahwa terdapat hubungan antara populasi dan IFR. Menurut Goff dan Pittman (2004), kota-kota besar umumnya memiliki fungsi akuntansi yang lebih besar dan anggaran yang lebih besar untuk pelayanan teknologi informasi. Fungsi akuntansi yang lebih luas sangat berkenaan dengan kebutuhan daerah-daerah besar untuk menyajikan lebih banyak data dalam laporan keuangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Styles dan Tennyson, 2007 bahwa kota-kota dengan jumlah penduduk yang lebih besar lebih mungkin untuk memberikan akses lebih mudah terhadap informasi laporan keuangan di internet. Verawaty (2012,a) mendukung hasil Styles dan Tennyson (2007). Namun Verawaty (2014) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *size* pemerintahan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR melalui *e-government*.

Secara umum, anggaran teknologi informasi yang lebih besar akan lebih membiayai daerah dengan suatu fungsi teknologi informasi yang mampu mendesain dan mempertahankan *website* yang lebih canggih. Hal ini jelas berhubungan dengan populasi penduduk, semakin besar kota, semakin besar jumlah penduduk dan semakin besar pula anggaran yang dapat terkumpul dan tentunya semakin tinggi pula tuntutan aksesibilitas akan informasi laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Terdapat hubungan positif antara *size* pemerintahan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*.

## **b. Variabel *Income Per Capita***

GASB (1999) dan GFOA (2003) menyatakan tujuan umum peningkatan laporan keuangan dalam penilaian kinerja keuangan dan pelayanan pemerintah. Daerah-daerah dengan pendapatan perkapita yang lebih besar memiliki permintaan akuntabilitas yang lebih tinggi (Giroux dan McLelland, 2003 dan Ingram, 1984). Daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat pengawasan politis yang lebih tinggi oleh kelompok masyarakat dan lebih banyak permintaan akan informasi yang dapat menyediakan ukuran-ukuran kinerja.

Pada masyarakat internet sekarang, semakin banyak kelompok masyarakat menyadari fungsi data laporan keuangan sebagai bagian dari serangkaian informasi untuk akuntabilitas daerah, semakin banyak individu akan mengharapkan akses terhadap data ini dalam suatu bentuk format elektronik yang paling nyaman atau paling mudah oleh mereka. Individu-individu ini akan meminta kualitas informasi dan akses yang sama di *website* pemerintah (*e-government*) sebagaimana yang mereka dapatkan di *website-website* lain.

Permintaan yang meningkat untuk laporan keuangan akan memerlukan efisiensi biaya untuk penyediaan data laporan keuangan di *website* pemerintah tersebut (GFOA, 2003). Efisiensi biaya ini akan lebih besar untuk daerah-daerah dengan pendapatan perkapita yang lebih tinggi yang secara umum memiliki proporsi yang lebih tinggi atas penduduk yang berhubungan dengan internet. Daerah-daerah dengan pendapatan perkapita yang tinggi kemungkinan akan memberikan aksesibilitas yang lebih mudah terhadap data laporan keuangan melalui *e-government* yang dimiliki.

Permintaan akuntabilitas yang lebih tinggi dan penggunaan internet yang lebih luas oleh penduduk dengan pendapatan perkapita yang lebih besar mengidentifikasi suatu hubungan yang positif antara pendapatan perkapita pemerintah daerah dan penyediaan laporan keuangan di *website*. Penelitian Giroux dan McLelland (2003) dan Robbins dan Austin (1986), Styles dan Tennyson (2007), dan Verawaty (2012,a) membuktikan bahwa terdapat hubungan antara pengungkapan akuntansi dan pendapatan perkapita. Namun pada penelitian Robbins dan Austin (1986) dan Verawaty (2014), hubungan ini tidak signifikan. Karena terdapat ketidakkonsistenan hasil, peneliti ingin menguji kembali dan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Terdapat hubungan positif antara *income per capita* penduduk pemerintahan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*.

### c. Variabel *Debt Level*

Penelitian-penelitian dalam literatur IFR untuk sektor privat menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang secara umum menyediakan informasi keuangan di *website* mereka yang disusun oleh pembuat undang-undang (contohnya SEC) dan disajikan melalui media lain (mengirim dokumen kopian kepada *stakeholder*) dapat memperluas *stakeholder* yang membutuhkan informasi. GFOA (2002) Penyediaan data laporan keuangan di *website* pemerintah (*e-government*) menyediakan kesempatan untuk memperluas *stakeholder* pengguna pasar modal dan kreditor lain.

Pemerintah dapat menggunakan hutang untuk membiayai pelayanan dan program yang relevan untuk disediakan bagi penduduk di daerah tersebut. Suatu evaluasi dari hutang daerah merupakan sebuah komponen integral dari akuntabilitas administrasi pemerintahan daerah. Membiayai pengeluaran daerah dengan hutang mempengaruhi kemampuan daerah tersebut untuk menyediakan program dan pelayanan di masa yang akan datang. Tingkat hutang yang lebih tinggi dapat membebankan beban bunga dan *principal repayment* di masa yang akan datang yang dapat mengurangi kemampuannya untuk memenuhi permintaan penduduk di masa yang datang untuk pelayanan atau beban pajak yang lebih tinggi untuk generasi pembayar pajak di masa yang akan datang (Brecher, et al, 2003).

Menurut Zimmerman (1977), penggunaan hutang untuk membiayai aktivitas publik merupakan pendorong bagi manajer sektor publik untuk mengurangi biaya hutang. Hal ini dapat diraih dengan IFR karena dengan media internet, pendistribusian laporan keuangan menjadi lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Penelitian tersebut juga didukung oleh Laswad et al (2005) bahwa *debt* berhubungan positif dengan ketersediaan IFR melalui *e-government*. Penelitian Styles dan Tennyson (2007) juga lebih jauh lagi meneliti bahwa aksesibilitasnya juga berhubungan dengan *debt level* pemerintah daerah tersebut.

Selain itu, penelitian Gore (2004) menemukan bahwa insentif yang diberikan oleh pemilik hutang untuk mempublikasikan laporan keuangan lebih dominan dari biaya-biaya atau tekanan-tekanan regulasi dan politis yang berhubungan dengan hal yang sama tanpa pengungkapan di internet. Hal ini disebabkan oleh pemberi hutang (debitur) akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dengan cara yang paling aplikatif atau dengan kata lain aksesibilitas yang lebih mudah dalam hal ini IFR melalui *e-government*. Namun pernyataan ini tidak didukung oleh Verawaty (2012,a) dan Verawaty (2014). Karena terdapat ketidakkonsistenan hasil, peneliti ingin menguji kembali dan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Terdapat hubungan positif antara *debt level* pemerintahan daerah dan aksesibilitas

laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada *hypothetico-deductive method*. Menurut Sekaran (2006), penelitian dengan menggunakan metoda ini melibatkan tujuh tahap, yaitu *observation, preliminary information gathering, theory formulation, hypothesis, further scientific data collection, data analysis, dan deduction*.

#### 2. Variabel Penelitian

Berikut tabel operasionalisasi variabel penelitian:

**Tabel 3.1**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
<b>Variabel Dependen:</b> <i>Internet Financial Reporting (IFRACCESS)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IFRACCESS merupakan nilai aksesibilitas pemerintah daerah terhadap IFR.</li> <li>▪ IFR merupakan seperangkat pengumuman mengenai informasi finansial tahunan secara elektronik atau yang ada dalam <i>e-government</i> pemerintah daerah tersebut (Laswad et al, 2005).</li> <li>▪ Berdasarkan penelitian Styles dan Tennyson (2007), aksesibilitas laporan keuangan terkait dengan kemudahan penggunaan untuk dapat menemukan dan melihat data laporan keuangan yang disediakan di internet.</li> </ul>	Berapa langkah yang diperlukan untuk menemukan laporan keuangan tersebut dalam <i>e-government</i>	Skala ordinal (IFRACCESS diukur dengan menggunakan <i>Calculation of Accessibility Index Value</i> ) pemerintah daerah <sub>i</sub> pada tahun <sub>i</sub>
<b>Variabel Independen:</b> 1. <i>Size (SIZE)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menurut Goff dan Pittman (2004), kota-kota besar umumnya memiliki fungsi akuntansi yang lebih besar dan anggaran yang lebih besar untuk pelayanan teknologi informasi. Fungsi akuntansi yang lebih luas sangat berkenaan dengan kebutuhan daerah-daerah besar untuk menyajikan lebih banyak data dalam laporan keuangan.</li> <li>▪ Salah satu karakteristik kota besar adalah populasi penduduk, yaitu jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu selama periode tertentu.</li> </ul>	Jumlah Penduduk	Skala nominal diukur dengan dengan log jumlah penduduk pemerintah daerah <sub>i</sub> pada tahun <sub>i</sub>
2. <i>Income per Capita (INCOME)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Hal ini berdasarkan penelitian Styles dan Tennyson (2007) dan Gore (2004).</li> <li>▪ PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita merupakan proksi untuk menentukan pendapatan perkapita penduduk.</li> </ul>	PDRB perkapita atas dasar harga berlaku	Skala nominal diukur dengan dengan log PDRB perkapita pemerintah daerah <sub>i</sub> pada tahun <sub>i</sub>
3. <i>Debt Level (DEBT)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Lampiran III yaitu PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, hutang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.</li> <li>▪ Berdasarkan penelitian Styles dan Tennyson (2007), total hutang dibagi dengan populasi.</li> </ul>	Hutang dalam neraca dan jumlah penduduk	Skala rasio diukur dengan perbandingan antara hutang dan jumlah penduduk pemerintah daerah <sub>i</sub> pada tahun <sub>i</sub>



Hipotesis akan diuji dengan persamaan:

$$IFRACCESS_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 SIZE_{it} + \beta_2 INCOME_{it} + \beta_3 DEBT_{it} + e_{it}$$

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 pemerintah daerah tingkat provinsi dan 33 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu atau *purposive sampling method*, yaitu memiliki *e-government* sampai dengan November 2014 dan *e-government* tersebut tidak dalam perbaikan (*maintenance*). Adapun untuk menentukan pemerintah kabupaten/kota mana yang mewakili tiap provinsi ditentukan berdasarkan kriteria tertentu atau *purposive sampling method*. Kriteria khusus tersebut adalah di setiap provinsi akan dipilih satu pemerintah kabupaten/kota yang merupakan daerah kategori paling luas, paling banyak penduduk, dan paling tinggi pendapatan per kapitanya. Hal ini berdasarkan penelitian Mussari dan Steccolini (2006) bahwa sampel yang bukan merupakan pemerintah dengan kota-kota yang besar dianggap tidak mendapat tuntutan tinggi tentang pengungkapan informasi laporan keuangannya.

Data dikumpulkan melalui observasi dengan media internet terhadap ketersediaan *e-government* pada 33 pemerintah daerah tingkat provinsi dan 33 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia serta ketersediaan IFR (*Internet Financial Reporting*) pada sampel yang ada. Setelah itu peneliti menilai aksesibilitasnya berdasarkan *accessibility index value* yang digunakan pada penelitian Styles dan Tennyson (2007).

Selain itu, data juga dikumpulkan melalui laporan-laporan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah melalui *website* Badan Pusat Statistik (BPS) (<http://bps.go.id>) dan *website* Departemen Keuangan (<http://djpk.depkeu.go.id>). Selain itu, tentunya data sekunder lainnya adalah berbagai sumber yang menjadi tinjauan pustaka dalam membangun hipotesis dan sekaligus mengujinya, antara lain buku-buku teks, artikel-artikel ilmiah ataupun populer, koran, serta internet.

### 4. Analisis Data

Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis kuantitatif. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) dengan menggunakan persamaan regresi. Pemilihan tehnik analisis ini adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. HASIL PENELITIAN

Hasil survei yang telah dilakukan pada periode penelitian terkait dengan *website* yang dimiliki oleh populasi penelitian, yaitu 66 pemerintah daerah di Indonesia, 33 pemerintah provinsi dan 33 pemerintah kabupaten/kota terpilih berdasarkan *purposive sampling*, menunjukkan bahwa 81,82% *e-government* pemerintah provinsi dalam status *online* atau hanya 27 *e-government*. Adapun hanya 84,85% *e-government* pemerintah kabupaten/kota dalam status online, yaitu 28 *e-government*, sisanya 9,09% *e-government* yang dimiliki dalam status *error* (kemungkinan dalam status *under maintenance*), yaitu 3 *e-government* dan 6,06% pemerintah kabupaten/kota bahkan belum memiliki *e-government*, yaitu 2 pemerintah kota.

Hasil survei juga menunjukkan adanya disparitas praktek pengungkapan informasi keuangan melalui *e-government* dan masih sedikitnya pemerintah daerah memanfaatkan penggunaan teknologi internet. Dari total 81,82% *e-government* pemerintah provinsi, hanya 25,93% yang melakukan IFR (*Internet Financial Reporting*). Adapun dari total hanya 84,85% *e-government* pemerintah kabupaten/kota, hanya 39,29% yang melakukan IFR (*Internet Financial Reporting*).

Berdasarkan Tabel 5.1 dan 5.2, sampel penelitian yang memenuhi kriteria berjumlah 37 sampel, yaitu memiliki *e-government* sampai dengan November 2014 dan *e-government* tersebut tidak dalam perbaikan (*maintenance*) sehingga bisa dinilai aksesibilitas IFR (*Internet Financial Reporting*). Dari populasi 33 pemerintah provinsi, hanya ada 20 sampel yang memenuhi. Dari 33 pemerintah kabupaten/kota, hanya ada 17 sampel yang memenuhi. Karena penelitian ini tidak mengelompokkan sampel, supaya jumlah sampel yang berasal dari tingkat pemerintah yang berbeda sama, maka ditentukan bahwa dalam setiap daerah jika pemerintah provinsinya tidak masuk sampel, walaupun pemerintah kota/kabupatennya memenuhi kriteria akan tetap tidak dimasukkan. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, tersisa hanya 28 sampel yang terdiri atas 14 pemerintah provinsi dan 14 pemerintah kabupaten/kota yang akan diuji secara statistik apakah terdapat hubungan positif antara tiga determinan yang dimiliki pemerintah daerah dengan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*.

**Tabel 5.1****Hasil Survei (Observasi) terhadap *e-Government* Pemerintah Provinsi**

<b>No.</b>	<b>Nama Provinsi</b>	<b>Status <i>E-Government</i></b>	<b>Aplikasi Fitur IFR</b>
1	Bali	Online	Ada
2	Banten	Online	Ada
3	Bengkulu	Error	Tidak Ada
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	Online	Ada
5	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Online	Ada
6	Gorontalo	Online	Ada
7	Jambi	Online	Ada
8	Jawa Barat	Online	Ada
9	Jawa Tengah	Online	Tidak Ada
10	Jawa Timur	Online	Ada
11	Kalimantan Barat	Online	Ada
12	Kalimantan Selatan	Online	Ada
13	Kalimantan Tengah	Online	Ada
14	Kalimantan Timur	Online	Ada
15	Kepulauan Bangka Belitung	Online	Ada
16	Kepulauan Riau	Online	Ada
17	Lampung	Online	Tidak Ada
18	Maluku	Online	Tidak Ada
19	Maluku Utara	Error	Tidak Ada
20	Nanggroe Aceh Darussalam	Online	Ada
21	Nusa Tenggara Barat	Online	Ada
22	Nusa Tenggara Timur	Online	Ada
23	Papua	Online	Tidak Ada
24	Papua Barat	Online	Tidak Ada
25	Riau	Online	Ada
26	Sulawesi Barat	Online	Tidak Ada
27	Sulawesi Selatan	Error	Tidak Ada
28	Sulawesi Tengah	Online	Tidak Ada
29	Sulawesi Tenggara	Online	Ada
30	Sulawesi Utara	Error	Tidak Ada
31	Sumatera Barat	Online	Ada
32	Sumatera Selatan	Error	Tidak Ada
33	Sumatera Utara	Error	Tidak Ada

*Sumber: Observasi langsung melalui internet (2014)*

Tabel 5.2

Hasil Survei (Observasi) terhadap *e-Government* Pemerintah kabupaten/Kota

No.	Nama Kota	Status <i>E-Government</i>	Aplikasi Fitur IFR
1	Kota Denpasar	Online	Ada
2	Kota Tangerang	Online	Ada
3	Bengkulu	Online	Tidak Ada
4	Kota Yogya	Online	Ada
5	Jakarta Pusat	Online	Tidak Ada
6	Kota Gorontalo	Online	Ada
7	Kabupaten Sungai Penuh	Online	Ada
8	Kota Bandung	Online	Ada
9	Kota Semarang	Online	Tidak Ada
10	Kota Surabaya	Online	Ada
11	Kota Pontianak	Error	Tidak Ada
12	Kota Banjarmasin	Online	Ada
13	Kota Palangkaraya	Online	Ada
14	Kota Bontang	Online	Ada
15	Kabupaten Bangka	Online	Ada
16	Kota Batam	Online	Ada
17	Lampung	Online	Tidak Ada
18	Kota Ambon	Online	Ada
19	Kota Sofifi	Belum Memiliki <i>E-government</i>	Tidak Ada
20	Kota Banda Aceh	Error	Tidak Ada
21	Kota Mataram	Online	Ada
22	Kota Kupang	Online	Ada
23	Kota Jayapura	Online	Tidak Ada
24	Kota Manokwari	Belum Memiliki <i>E-government</i>	Tidak Ada
25	Kota Dumai	Online	Ada
26	Kota Mamuju	Online	Tidak Ada
27	Kota Makasar	Online	Tidak Ada
28	Kota Palu	Error	Tidak Ada
29	Kota Kendari	Online	Tidak Ada
30	Kota Manado	Online	Tidak Ada
31	Kota Bukit Tinggi	Online	Ada
32	Kota Palembang	Online	Tidak Ada
33	Kota Medan	Online	Tidak Ada

Sumber: Observasi langsung melalui internet (2014)

Berikut tabel data yang akan diolah untuk menguji hipotesis-hipotesis yang ada:

**Tabel 5.3**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEMDA</b>	<b>Var IFRACCESS</b>	<b>Var SIZE*</b>	<b>Var INCOME*</b>	<b>Var DEBT*</b>
1	Bali	3	6.59	6.83	4.52
2	Banten	7	7.03	6.98	3.94
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	7	6.54	6.83	3.26
4	Gorontalo	7	6.02	6.44	4.22
5	Jawa Barat	6	7.63	6.88	4.14
6	Jawa Timur	3	7.57	6.93	4.15
7	Kalimantan Selatan	7	6.56	6.92	4.96
8	Kalimantan Tengah	5	6.34	6.93	0.84
9	Kepulauan Bangka Belitung	5	6.09	6.94	1.85
10	Kepulauan Riau	5	6.23	7.13	4.55
11	Nusa Tenggara Barat	7	6.65	6.91	4.78
12	Nusa Tenggara Timur	6	6.67	6.42	2.01
13	Riau	3	6.74	6.94	4.03
14	Sumatera Barat	4	6.69	6.90	3.31
15	Kota Denpasar	2	5.90	6.83	4.38
16	Kota Tangerang	7	6.25	6.98	3.95
17	Kota Yogya	8	5.59	6.83	3.93
18	Kota Gorontalo	6	5.25	6.44	4.93
19	Kota Bandung	8	6.50	6.88	2.93
20	Kota Surabaya	6	6.44	6.93	2.85
21	Kota Banjarmasin	7	5.80	6.92	4.96
22	Kota Palangkaraya	3	5.34	6.93	5.01
23	Kabupaten Bangka	4	5.44	6.94	3.82
24	Kota Batam	7	5.98	7.13	3.36
25	Kota Mataram	3	5.61	6.91	4.27
26	Kota Kupang	4	5.54	6.42	3.05
27	Kota Dumai	7	5.40	6.94	4.56
28	Kota Bukit Tinggi	4	5.05	6.90	4.04

Keterangan:

\*: Dalam log10

Hubungan antara *size*, *income per capita*, dan *debt* pemerintahan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government* diuji secara simultan sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.777	3	.259	.072	.974 <sup>a</sup>
	Residual	85.901	24	3.579		
	Total	86.679	27			

a. Predictors: (Constant), DEBT, INCOME, SIZE

b. Dependent Variable: IFRACCESS

Hasil uji F pada Tabel 5.4 menunjukkan bahwa nilai tidak signifikan adalah 0.974 yang bernilai lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variable *size*, *income per capita*, dan *debt level* pemerintah daerah secara simultan terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*.

Hubungan antara *size*, *income per capita*, dan *debt* pemerintahan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government* diuji secara parsial sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.678	13.168		.507	.617
	SIZE	.208	.569	.077	.365	.719
	INCOME	-.337	1.958	-.036	-.172	.865
	DEBT	-.068	.367	-.039	-.186	.854

a. Dependent Variable: IFRACCESS

Dengan menggunakan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 5%, jika nilai sig.  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan secara parsial dari variabel terikat. Sebaliknya jika nilai sig.  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini tidak ada pengaruh signifikan secara parsial dari variabel terikat.

## 2. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 1. Hipotesis 1: Terdapat hubungan positif antara *size* pemerintahan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*.

Berdasarkan hasil regresi Tabel 5.5, dengan nilai signifikansi 0,719, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *size* pemerintah daerah dengan proksi jumlah penduduk dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR melalui penerapan *e-government*. Hal ini berdasarkan perhitungan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik, yaitu 0,719 yang berarti tidak menunjukkan signifikansi ( $p < 0,10$ ). Dengan demikian jumlah penduduk secara statistik belum dapat menjadi determinan (faktor penentu) yang dapat menjelaskan aksesibilitas IFR melalui *e-government*.

Saat ini, pemerintah daerah menghadapi kenaikan permintaan atau tuntutan terhadap pengawasan informasi, terutama tuntutan yang lebih besar terhadap kinerja. Secara umum, daerah dengan jumlah penduduk yang besar akan menyediakan program dan pelayanan untuk penduduk dalam jumlah besar dan mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya. Dengan demikian semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula tuntutan akan pengungkapan keuangan sektor publiknya. Kenyataannya, Provinsi Jawa Barat dengan log jumlah penduduk terbesar, yaitu 7,63 hanya memiliki tingkat aksesibilitas IFR pada nilai 6 dari tingkat ideal 10. Adapun Kota Yogya yang memiliki log jumlah penduduk di bawah mean 6,19, yaitu 5,59 malah memiliki tingkat aksesibilitas IFR tertinggi selain Kota Bandung, yaitu pada nilai 8. Selain itu, provinsi lain yang memiliki jumlah penduduk di atas *mean* pun mayoritas masih belum memfasilitasi IFR dengan aksesibilitas yang tinggi.

Berdasarkan literatur terdahulu, menurut Giroux dan Shield (1993) dan Giroux dan McLelland (2003), pemerintah daerah menghadapi kenaikan permintaan atau tuntutan terhadap pengawasan informasi. Aktivitas program dan pelayanan untuk jumlah penduduk yang besar dengan pengeluaran sumber daya yang pastinya besar mengakibatkan permintaan informasi dalam jumlah yang besar atas informasi kinerja pemerintah, termasuk juga pemerintah daerah sehingga semakin besar anggaran untuk aktivitas yang dapat terkumpul tersebut dan tentunya semakin tinggi pula tuntutan akan fungsi akuntansi. Permintaan tersebut dapat diakomodir melalui IFR yang merupakan metode pengungkapan alternatif yang lebih efektif dan aksesibilitasnya yang secara teoritis, semakin banyak poin yang didapat berdasarkan berapa langkah yang diperlukan untuk menemukan laporan keuangan dalam *e-government*, semakin baik. Penelitian ini didukung oleh Styles dan Tennyson (2007) yang membuktikan bahwa kota dengan jumlah penduduk yang besar memiliki hubungan positif

untuk dengan aksesibilitas IFR melalui *e-government*. Penelitian dari Indonesia, yaitu Verawaty dan Merina (2011) dengan sampel pemerintah provinsi, juga mendukung penelitian-penelitian asing tersebut. Akan tetapi dengan sampel yang lebih banyak, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, penelitian ini belum mendukung penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap praktisi-praktisi pemerintah daerah, jumlah penduduk sebenarnya tidak menjadi alasan signifikan aksesibilitas IFR, akan tetapi apakah penduduk yang mendiami daerah tersebut memiliki *techno-minded* (pola pikir yang menghubungkan keputusan dengan informasi yang didapat melalui teknologi informasi) atau tidak. Menurut para praktisi tersebut, difusi teknologi informasi di dalam kegiatan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan merupakan salah satu alasan penting. Artinya, *karakteristik penduduk* menentukan tingkat tekanan tuntutan masyarakat atas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik IFR melalui *e-government*, termasuk aksesibilitasnya. Karena pemerintah daerah di Indonesia saat ini merasa bahwa secara umum penduduk belum memahami fungsi teknologi informasi untuk pelaporan akuntansi sektor publik. Jadi yang diperlukan bukan kuantitas penduduk, tetapi kualitas penduduk sehingga dapat memiliki alasan yang kuat untuk menuntut IFR pemerintah daerah tersebut karena telah dapat memahami manfaatnya yang dapat didapat.

## **2. Hipotesis 2: Terdapat hubungan positif antara *income per capita* penduduk pemerintahan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*.**

Berdasarkan hasil regresi Tabel 5.5, dengan nilai signifikansi 0,865, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *income per capita* pemerintah daerah dengan proksi PDRB perkapita dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR melalui penerapan *e-government*. Hal ini berdasarkan perhitungan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik, yaitu 0,865 yang berarti tidak menunjukkan signifikansi ( $p < 0,05$ ). Dengan demikian *income per capita* secara statistik belum dapat menjadi determinan (faktor penentu) yang dapat menjelaskan aksesibilitas IFR melalui *e-government*.

Permintaan akuntabilitas yang lebih tinggi dan penggunaan internet yang lebih luas oleh penduduk dengan pendapatan perkapita yang lebih besar mengidentifikasi suatu hubungan yang positif antara pendapatan perkapita pemerintah daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di *website* atau IFR melalui *e-government*. Semakin tinggi pendapatan



perkapita penduduk, semakin tinggi pula kemampuannya sebagai masyarakat *techno-minded* sehingga semakin banyak kelompok masyarakat menyadari fungsi data laporan keuangan sebagai bagian dari serangkaian informasi untuk akuntabilitas daerah, semakin banyak individu akan mengharapkan akses terhadap data ini dalam suatu bentuk format elektronik yang paling nyaman atau paling mudah oleh mereka. Individu-individu ini akan meminta kualitas informasi dan akses yang sama di *website* pemerintah sebagaimana yang mereka lakukan di *website-website* lain. Semakin mudah aksesibilitas terhadap laporan keuangan (IFR) melalui *e-government*, semakin baik diseminasi informasi publik yang dilakukan. Kenyataannya, Kota Batam dengan log jumlah pendapatan perkapita terbesar, yaitu 7,13 hanya memiliki tingkat aksesibilitas IFR pada nilai 7 dari tingkat ideal 10. Selain itu, pemerintah lain yang memiliki pendapatan perkapita di atas *mean* pun mayoritas masih belum mayoritas masih belum memfasilitasi IFR dengan aksesibilitas yang tinggi.

Berdasarkan literatur terdahulu, menurut GASB (1999) dan GFOA (2003) dalam Styles dan Tennyson (2007) menyatakan daerah-daerah dengan pendapatan perkapita yang lebih besar memiliki permintaan akuntabilitas laporan keuangan yang lebih tinggi. Daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat pengawasan politis yang lebih tinggi oleh kelompok masyarakat dan lebih banyak permintaan akan informasi yang dapat menyediakan ukuran-ukuran kinerja. Penelitian Laswad et al (2005), Styles dan Tennyson (2007), dan Verawaty dan Merina (2011) mendukung hasil penelitian tersebut dengan mengaitkan pelaporan laporan keuangan tersebut melalui media internet atau IFR melalui *e-government*, termasuk aksesibilitasnya. Namun hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Robbins dan Austin (1986) yang menyatakan bahwa tidak hubungan positif pendapatan perkapita dengan pengungkapan akuntansi di sektor publik. Penelitian yang peneliti lakukan di Indonesia dengan sampel pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendukung Robbins dan Austin (1986).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap praktisi-praktisi pemerintah daerah, *income percapita* sebenarnya tidak menjadi alasan signifikan aksesibilitas IFR, akan tetapi apakah *kultur mendokumentasi* sudah lazim atau belum. Salah satu kesulitan besar yang dihadapi pemerintah daerah adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja) dengan media teknologi informasi. Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar *software engineering* yang seharusnya telah menjadi kompetensi pemerintah. Selain itu *e-leadership*, yaitu prioritas dan inisiatif pemerintah daerah tersebut di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi juga menjadi alasan penting.

### **3. Hipotesis 3: Terdapat hubungan positif antara *debt level* pemerintahan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*.**

Berdasarkan hasil regresi Tabel 5.5, dengan nilai signifikansi 0,854 penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *debt* pemerintah daerah dengan proksi rasio hutang terhadap jumlah penduduk dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR melalui penerapan *e-government*. Hal ini berdasarkan perhitungan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik, yaitu 0,854 yang berarti tidak menunjukkan signifikansi ( $p < 0,10$ ). Dengan demikian *debt* secara statistik belum dapat menjadi determinan (faktor penentu) yang dapat menjelaskan aksesibilitas IFR melalui *e-government*.

Pemerintah menggunakan hutang untuk membiayai pelayanan dan program yang relevan untuk disediakan bagi penduduk di daerah tersebut. Suatu evaluasi dari hutang daerah merupakan sebuah komponen integral dari akuntabilitas administrasi pemerintahan lokal. Membiayai pengeluaran daerah dengan hutang mengakibatkan kemampuan daerah tersebut untuk menyediakan program dan pelayanan di masa yang akan datang. Artinya diasumsikan pemerintah daerah dengan tingkat rasio kemampuan berhutang neraca terkecil merupakan provinsi yang seharusnya tidak memiliki alasan untuk tidak mempublikasikan laporan keuangan melalui *e-government* yang memang telah dimiliki. Kenyataannya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tingkat hutang paling rendah, yaitu 0,84, tetapi hanya memiliki tingkat aksesibilitas IFR pada nilai 7 dari tingkat ideal 10. Selain itu, dari 21,43% sampel yang memiliki rasio hutang di bawah *mean*, 33,33% poin aksesibilitasnya di atas masih di bawah *mean* aksesibilitas (IFRACCESS).

Berdasarkan literatur terdahulu, menurut Zimmerman (1977) dalam Laswad et al (2005), penggunaan hutang untuk membiayai aktivitas publik merupakan pendorong bagi manajer sektor publik untuk mengurangi biaya hutang. Hal ini dapat diraih dengan IFR karena dengan media internet, pendistribusian laporan keuangan menjadi lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini juga didukung oleh penelitian Styles dan Tennyson (2007) bahwa untuk memperluas *stakeholder* yang membutuhkan informasi laporan keuangan tanpa mengurangi kemampuannya untuk memenuhi permintaan penduduk di masa yang datang untuk pelayanan publik, maka dengan memanfaatkan media internet yang telah dimiliki atau IFR melalui *e-government* termasuk mempermudah aksesibilitasnya merupakan aktivitas yang tidak akan menambah hutang daerah. Namun hal ini tidak didukung Verawaty dan Merina (2011). Dengan demikian hasil penelitian kembali membuktikan bahwa di Indonesia belum terdapat hubungan positif antara *debt* pemerintah daerah dengan proksi rasio hutang terhadap jumlah

penduduk dan aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR melalui penerapan *e-government*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap praktisi-praktisi pemerintah daerah, hutang seharusnya menjadi alasan signifikan aksesibilitas IFR. Jika ternyata suatu pemerintah daerah berhutang, baik rasionya rendah atau tinggi, maka mungkin terdapat/akan terdapat tekanan politis untuk mempublikasikan laporan keuangannya lebih mudah atau jumlah poin aksesibilitasnya tinggi.

## **5. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

### **1. Kesimpulan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji untuk menganalisis aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government* dengan variabel-variabel yang diasumsikan memiliki hubungan positif, yaitu *size*, *debt*, *income per capita*, dan *debt level* pemerintah daerah serta implikasinya penerapan IFR dengan mengkaitkannya dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 (informasi mengenai laporan keuangan saja). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *size*, *income per capita*, dan *debt level* dengan aksesibilitas laporan keuangan.

Melalui metoda wawancara diperoleh ditambahkan argumen bahwa karakteristik penduduk, kultur mendokumentasi, dan tekanan politis menjadi pertimbangan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap laporan keuangan dalam *e-government*. Selain itu aspek yuridis, terutama Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ternyata belum mengatur tentang cara atau prosedur menyebarluaskan informasi publik. Jadi diseminasi laporan keuangan melalui internet/IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government* masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

### **2. Implikasi Penelitian**

Implikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dalam dunia praktis, hasil penelitian ini setidaknya dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerapan *e-government* dalam bidang akuntansi, yaitu (*Internet Financial Reporting*) sehingga akan tercapai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik, bahkan bisa menjadi

bahan pertimbangan untuk mewajibkan diseminasi informasi laporan keuangan melalui *e-government* supaya lebih banyak *stakeholder* publik yang bisa dijangkau.

2. Implikasi penelitian ini terhadap perkembangan pelaksanaan UU KIP adalah pentingnya suatu lembaga yang mengatur dan menilai kualitas pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui *e-government*. Tentu saja ini juga akan berimplikasi pada perlunya dilakukan regulasi terhadap pengungkapan optimalisasi pemanfaatan *e-government*, baik bagi pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah kota dan kabupaten.

### 3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya berdasarkan keterbatasan penelitian, yaitu memperbesar jumlah sampel, yaitu *pertama*, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota agar hasil penelitian berikutnya lebih bisa digeneralisir, *kedua*, menambahkan variabel-variabel yang lainnya yang layak digunakan untuk menjelaskan aksesibilitas IFR melalui *e-government* sebagai sarana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik dan *ketiga*, menggunakan data *time series* sehingga bisa dilihat tren penyediaan IFR melalui media *e-government* dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.

### DAFTAR PUSTAKA

- Brecher, C., Richwergwer, K., & Van Wagner, M., 2003. An Approach to Measuring the Affordability of State Debt. *Public Budgeting & Finance*, 23 (4): 65-85.
- Evans, J., & Patton, J., 1987. Signaling and Monitoring in Public Sector Accounting. *Journal of Accounting Research* 25 (Supplement), 130-158.
- Fadzil, F.H., & Nyoto, H., 2011. Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. *World Review of Business Research* Vol 1 No, 2 pp 51-70.
- Giroux, G. & Shields, D., 1993. Accounting Control and Bureaucratic Strategies in Municipal Government. *Journal of Accounting and Public Policy*, 12: 239-262.
- Giroux, G. & McLelland, A.J., 2003. Governance Structures and Accounting at Large Municipalities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22: 203-230.
- Gore, A., 2004. The Effects of GAAP Resolution and Bond Market Interaction on Local Government Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 23: 23-52.
- Government Accounting Standards Board (GASB), 1999. *Basic Financial Statements and Management's Discussion and Analysis for State and Local Government, Statement No.34*, Norwalk, CT: Author.
- Government Finance Officers Association (GFOA), 2002. *Recommended Practice: Using a Website for Disclosure*, diakses 30 Sept 2014,

- <[www.gfoa.org/services/rp/debt/debt-using-web.pdf](http://www.gfoa.org/services/rp/debt/debt-using-web.pdf)>.
- Government Finance Officers Association (GFOA), 2003. *Recommended Practice: Using Websites to Improve Access to Budget Documents and Financial Reports*, diakses 30 Sept 2014, <[www.gfoa.org/services/rp/caafr/caafr-budgets-to-websites.pdf](http://www.gfoa.org/services/rp/caafr/caafr-budgets-to-websites.pdf)>.
- Groff, JF, & Pitman, M.K, 2004. *Municipal Financial Reporting on the World Wide Web: A Survey of Financial Data Displayed on the Official Websites of the 100 largest US Municipalities*. *Journal of Government Financial Management*.
- Halim, A., & Abdullah, S., 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1 pp 53-64*.
- Ingram, R.W., & Dejong, D.V., 1987. *The Effect of Regulation on Local Government Disclosure Practises*. *Journal of Accounting and Public Policy*,6: 245-270.
- Laswad, Fawzi, Fisher, Richard & Oyelere, Peter, 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Moe, T.M., 1984. The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.
- Mussari, Riccardo & Steccolini, Ileana, 2006. *Using the Internet for Communicating Performance Information*. *Public Money and Management Journal*.
- Oyelere, Peter, Laswad, Fauzi, & Fisher, Richard, 2003. *Determinant of Internet Financial Reporting by New Zealand Companies*. *Journal of International Financial Management and Accounting*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Robbins, W.A. & Austin, K.R., 1986. *Disclosure Quality in Governmental Financial Report: An Assessment of the Appropriateness of A Compound Measure*. *Journal of Accounting Research*.
- Sekaran, Uma, 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Penebit Salemba Empat.
- Styles, Alan K. & Tennyson, Mack, 2007. *The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Spring.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Verawaty, 2012,a. *The Accessibility of Public Information of Local Government through E- Government in Indonesia*, proceedings of International Public Sector Conference (IPSC) 2012, Kinabalu, Malaysia, pp. 044 (1-9).
- Verawaty, 2012,b. *The Availability of IFR (Internet Financial Reporting) through E- Government as Public Transparency, Participation, and Accountability Means In Indonesia*, proceedings of The 13th Malaysia-Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting (MICEMA), Palembang, Indonesia, pp. 562-579.
- Verawaty & Merina, Citra Indah, 2011. *Aksesibilitas Informasi Publik Pemerintah Provinsi di Indonesia (Telaah Penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik)*. Penelitian DIPA Dikti Tahun 2011.
- Verawaty, 2014. The Accessibility Determinants of Internet Financial Reporting of Local Government: Further Evidence from Indonesia. *World Review of Business Research*, Vol. 4. No. 2 July 2014, pp. 176-195.
- Zimmerman, J., 1977. *The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives*. *Journal of Accounting Research*, 15: 107-144.

## **Lampiran 1: Calculation of Accessibility Index Value**

Berikut *Calculation of Accessibility Index Value* (Styles dan Tennyson, 2007), yang menjadi dasar untuk menilai berapa langkah yang diperlukan untuk menemukan laporan keuangan dalam *e-government*:

### **Lampiran 1 Calculation of Accessibility Index Value**

The accessibility index was calculated as follows for each city that provided CAFR data on its official website:

- 1 point if official city website appears on first page of results for Google or Yahoo search using city name and state (A).**
- + 1 point if official city website has link to CAFR data on website homepage (B).**
- + 1 point if official city website has search engine that finds CAFR using terms CAFR and/or financial statements (C).**
- + 1 point if 3 or less web pages (or clicks of mouse) to view CAFR data from city website homepage (D).±**
- + 1 point if CAFR provided on official city website as indexed pdf file(s) or HTML format (E).**
- + 1 point if city provides CAFR data in more than one file; files for different sections/pages of full CAFR document (F).**
- + 1 point if individual file(s) providing CAFR data less than 3MB in size (G).±±**
- + 1 point if official city web site provides CAFR data for prior years (H).**
- + 1 point if official city web site provides information on obtaining or access to a printed copy of the city's CAFR (I).**
- + 1 point if official city web site provides contact details (phone and/or email) for individual/department that compiled CAFR (J).**

**= Possible score of 10 points**

**± Groff and Pitman's (2004) survey of the websites of the 100 largest U.S. municipalities report the average number of pages before accessing the full CAFR was 2.42. LaVigne et al. (2001) also suggest users should not have to click more than three times to access the information.**

**±± In a pilot study of 100 municipality websites of varying sizes conducted by the authors the average size of the file providing CAFR data was 3MB. `**

**Lampiran 2: Deskripsi Data *Internet Financial Reporting* (IFRACCES)**

NO	NAMA PEMDA	STATUS	POIN AKSESIBILITAS										KET.	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		JML
1	Bali	Online	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	IFR
2	Banten	Online	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	7	IFR
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	Online	1	1	-	-	1	1	1	1	-	1	7	IFR
4	Gorontalo	Online	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	7	IFR
5	Jawa Barat	Online	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	6	IFR
6	Jawa Timur	Online	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	IFR
7	Kalimantan Selatan	Online	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	7	IFR
8	Kalimantan Tengah	Online	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	5	IFR
9	Kepulauan Bangka Belitung	Online	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	5	IFR
10	Kepulauan Riau	Online	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	5	IFR
11	Nusa Tenggara Barat	Online	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	7	IFR
12	Nusa Tenggara Timur	Online	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	6	IFR
13	Riau	Online	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	IFR
14	Sumatera Barat	Online	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	4	IFR
15	Kota Denpasar	Online	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	IFR
16	Kota Tangerang	Online	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	7	IFR
17	Kota Yogya	Online	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	8	IFR
18	Kota Gorontalo	Online	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	6	IFR
19	Kota Bandung	Online	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	8	IFR
20	Kota Surabaya	Online	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	6	IFR
21	Kota Banjarmasin	Online	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	7	IFR
22	Kota Palangkaraya	Online	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	IFR
23	Kabupaten Bangka	Online	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	4	IFR
24	Kota Batam	Online	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	7	IFR
25	Kota Mataram	Online	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	IFR
26	Kota Kupang	Online	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	4	IFR
27	Kota Dumai	Online	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	7	IFR
28	Kota Bukit Tinggi	Online	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	4	IFR

Sumber: Observasi langsung melalui internet (e-government sampel) 2014

**Lampiran 3: Deskripsi Data Size**

NO	NAMA PEMDA	JUMLAH PENDUDUK
1	Bali	3.890.757
2	Banten	10.632.166
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	3.457.491
4	Gorontalo	1.040.164
5	Jawa Barat	43.053.732
6	Jawa Timur	37.476.757
7	Kalimantan Selatan	3.626.616
8	Kalimantan Tengah	2.212.089
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.223.296
10	Kepulauan Riau	1.679.163
11	Nusa Tenggara Barat	4.500.212
12	Nusa Tenggara Timur	4.683.827

13	Riau	5.538.367
14	Sumatera Barat	4.846.909
15	Kota Denpasar	787.842
16	Kota Tangerang	1.796.601
17	Kota Yogya	388.627
18	Kota Gorontalo	179.715
19	Kota Bandung	3.174.499
20	Kota Surabaya	2.751.389
21	Kota Banjarmasin	625.481
22	Kota Palangkaraya	220.962
23	Kabupaten Bangka	277.204
24	Kota Batam	949.775
25	Kota Mataram	402.843
26	Kota Kupang	342.892
27	Kota Dumai	253.803
28	Kota Bukit Tinggi	112.912

Sumber: BPS (2014)

#### Lampiran 4: Deskripsi Data *Income per Capita (INCOME)*

NO	NAMA PEMDA	PDRB Per Kapita
1	Bali	6.719.140,83
2	Banten	9.600.838,73
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	6.772.344,42
4	Gorontalo	2.735.860,48
5	Jawa Barat	7.599.364,31
6	Jawa Timur	8.533.980,89
7	Kalimantan Selatan	8.257.340,68
8	Kalimantan Tengah	8.434.902,46
9	Kepulauan Bangka Belitung	8.724.178,11
10	Kepulauan Riau	13.635.690,31
11	Nusa Tenggara Barat	8.086.217,83
12	Nusa Tenggara Timur	2.648.265,09
13	Riau	8.763.304,05
14	Sumatera Barat	8.021.800,31
15	Kota Denpasar	6.719.140,83
16	Kota Tangerang	9.600.838,73
17	Kota Yogya	6.772.344,42
18	Kota Gorontalo	2.735.860,48
19	Kota Bandung	7.599.364,31
20	Kota Surabaya	8.533.980,89
21	Kota Banjarmasin	8.257.340,68
22	Kota Palangkaraya	8.434.902,46
23	Kabupaten Bangka	8.724.178,11
24	Kota Batam	13.635.690,31
25	Kota Mataram	8.086.217,83
26	Kota Kupang	2.648.265,09
27	Kota Dumai	8.763.304,05
28	Kota Bukit Tinggi	8.021.800,31

Sumber: BPS (2014)



**Lampiran 5: Deskripsi Data Debt Level (DEBT)**

No	Nama PEMDA	Hutang Berdasarkan Neraca Tahun 2012 (Rp)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Hutang dan Jumlah Penduduk
1	Bali	129.654.112.860,61	3.890.757	33.323,62
2	Banten	92.031.033.129,00	10.632.166	8.655,91
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	6.291.413.360,51	3.457.491	1.819,65
4	Gorontalo	17.426.427.798,00	1.040.164	16.753,54
5	Jawa Barat	595.270.587.341,88	43.053.732	13.826,23
6	Jawa Timur	527.860.886.755,62	37.476.757	14.085,02
7	Kalimantan Selatan	333.267.683.451,00	3.626.616	91.894,95
8	Kalimantan Tengah	15.453.227,00	2.212.089	6,99
9	Kepulauan Bangka Belitung	86.352.620,64	1.223.296	70,59
10	Kepulauan Riau	59.858.220.246,00	1.679.163	35.647,65
11	Nusa Tenggara Barat	272.159.806.864,00	4.500.212	60.477,11
12	Nusa Tenggara Timur	474.541.236,64	4.683.827	101,31
13	Riau	59.858.220.246,00	5.538.367	10.807,92
14	Sumatera Barat	9.970.198.176,88	4.846.909	2.057,02
15	Kota Denpasar	18.823.372.512,28	787.842	23.892,32
16	Kota Tangerang	15.914.440.753,33	1.796.601	8.858,08
17	Kota Yogya	3.273.360.240,40	388.627	8.422,88
18	Kota Gorontalo	15.323.756.560,00	179.715	85.266,99
19	Kota Bandung	2.726.762.403,00	3.174.499	858,96
20	Kota Surabaya	1.947.416.278,83	2.751.389	707,79
21	Kota Banjarmasin	57.138.501.110,82	625.481	91.351,30
22	Kota Palangkaraya	22.675.506.497,35	220.962	102.621,75
23	Kabupaten Bangka	1.813.249.833,63	277.204	6.541,21
24	Kota Batam	2.167.009.901,52	949.775	2.281,60
25	Kota Mataram	7.536.472.373,08	402.843	18.708,21
26	Kota Kupang	388.188.616,00	342.892	1.132,10
27	Kota Dumai	9,217,685,765.38	253.803	36.318,27
28	Kota Bukit Tinggi	1.225.399.540,08	112.912	10.852,70

Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)